

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021



DINAS SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA BANDUNG TAHUN 2021

Jl. Babakan Karet Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan bidang kesejahteraan sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakatnya. Sebagai pencerminan dari tujuan nasional yang termaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan sumber bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengamanatkan bahwa salah satu tujuan nasional adalah meningkatkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial.

Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial dilaksanakan melalui usaha-usaha Kesejahteraan Sosial yang mencakup semua upaya program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan bersama sebagai tanggungjawab pemerintah dan masyarakat.

Kehidupan sosial pada saat ini dilandaskan pada kurangnya peranan sosial, pengendalian dan pengawasan usaha kesejahteraan sosial, kurangnya jaminan sosial dan kurangnya penggalan sumber kesejahteraan sosial.

Guna mewujudkan sasaran penanganan kehidupan sosial yang dinamis maka program kerja Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung diarahkan kepada pelaksanaan Pembinaan Partisipasi Sosial Masyarakat, Rehabilitasi Sosial, Pelayanan Sosial dan Pembinaan terhadap Rawan Sosial.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2021 ini adalah :

1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Anak yang Bermasalah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 20/HUK/99 tentang Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah Tuna Sosial;
18. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 50/HUK/2004 tentang Standarisasi Panti Sosial;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak;
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penanganan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
23. Peraturan Walikota Bandung No. 1385 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi pada Dinas Daerah Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk menyusun Rencana Kerja Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dalam kurun waktu satu tahun (tahun 2021), dengan memadukan penjabaran RKPD dengan Renstra SKPD yang memuat rancangan dalam bidang sosial, program prioritas Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dan rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung tahun 2021 adalah :

1. Menyusun Rencana Kerja Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung tahun 2021 untuk menghasilkan suatu acuan guna pelaksanaan program dan kegiatan bagi Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung pada Tahun 2021.
2. Menyusun Rencana Kerja Tahun 2021 untuk menjadi acuan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung tahun 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2021 yakni :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik yang menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TRIWULAN III

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2019 perkiraan capaian tahun 2020, mengacu pada APBD Tahun 2020 serta dikaitkan dengan dengan pencapaian target Renstra Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung berdasarkan realisasi program dan

kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menjelaskan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan rangkuman atas Rencana Kerja Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2021

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra SKPD

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pelayanan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung pada tahun 2020 tidak mengalami hambatan yang berarti hal tersebut dapat terlihat pada pencapaian atas realisasi kinerja dan target rencana yang sebagian besar terpenuhi, bahkan mayoritas realisasi kinerja mencapai target. Namun demikian masih terdapat beberapa target sasaran yang masih belum dapat dicapai sesuai dengan target yang telah direncanakan dikarenakan gagal lelang atau tender, adapun kegiatan yang belum tercapai diantaranya:

1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti
2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

Dengan belum tercapainya target pada kegiatan di atas tentunya berdampak pada capaian kinerja program Renstra. Adapun langkah- langkah yang ditempuh untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, yakni :

- a. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
- b. Mengoptimalkan proses pelaksanaan perencanaan sasaran pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian
Renstra SKPD s.d Tahun 2020 Dinas Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan Kota Bandung**

6

			1.06.1.06.01.001.01.011 - Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah laporan Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan (laporan)	60 Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100,00%	12 laporan	12 Laporan	100,00%
			1.06.1.06.01.001.01.014 - Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga (laporan)	60 Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100,00%	12 laporan	12 Laporan	100,00%
			1.06.1.06.01.001.01.015 - Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan (laporan)	60 Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100,00%	12 laporan	12 Laporan	100,00%
			1.06.1.06.01.001.01.017 - Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman (laporan)	60 Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100,00%	12 laporan	12 Laporan	100,00%
			1.06.1.06.01.001.01.018 - Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah (laporan)	60 Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100,00%	12 laporan	12 Laporan	100,00%
			1.06.1.06.01.001.01.023 - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Penyediaan jasa kebersihan, keamanan, dan supir kantor (Orang)	102 Orang	102 Orang	102 Orang	102 Orang	100,00%	102 Orang	102 Orang	100,00%
				Penyediaan Jasa Adimistrasi Perkantoran (Orang)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
			1.06.1.06.01.001.01.023 - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Penyediaan jasa kebersihan, keamanan, dan supir kantor (Orang)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
				Penyediaan Jasa Adimistrasi Perkantoran (Orang)	16 Orang	14 Orang	14 Orang	14 Orang	100,00%	14 Orang	14 Orang	100,00%
			1.06.1.06.01.001.02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai (%)	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%

			1.06.1.06.01.001.02.022 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (laporan)	7 Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100,00%	12 laporan	12 Laporan	100,00%
			1.06.1.06.01.001.02.048 - Kegiatan Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO 9001-2005 Manajemen Mutu	Status sertifikasi ISO 9001-2015 dan jumlah dokumen draft Raperwal / Kajian penyelenggaraan kesos (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
			1.06.1.06.01.001.02.049 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana	Jumlah laporan pemeliharaan sarana dan prasarana (laporan)	60 Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100,00%	12 laporan	12 Laporan	100,00%
			1.06.1.06.01.001.05 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang meningkat kompetensinya	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%
			1.06.1.06.01.001.05.004 - Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah laporan kegiatan pembinaan kinerja aparatur (laporan)	100%	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100,00%	12 laporan	12 Laporan	100,00%
			1.06.1.06.01.003.24 - Program Perlindungan Sosial Bencana	Cakupan korban bencana yang terlayani tepat waktu (%)	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%
			1.06.1.06.01.003.24.001 - Kegiatan peningkatan kapasitas SDM dan perlengkapan Kebencanaan	Jumlah personil Tagana yang memperoleh insentif selama 1 tahun (Orang)	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	100,00%	60 Orang	60 Orang	100,00%
			1.06.1.06.01.003.24.002 - Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Kegiatan penanganan masalah - masalah strategis yang menyangkut tanggap, cepat darurat serta kejadian luar biasa	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%

					(%)								
				1.06.1.06.01.004.26 - Program Pelayanan Terpadu Kemiskinan	Cakupan warga miskin yang memperoleh akses terhadap program pemerintah (KK)	65000 KK	100%	65000 KK	56646 keluarga	87,15%	100%	100%	100,00%
					Persentase perangkat daerah terkait yang telah memanfaatkan BDT (%)	100%		100%					100,00%
				1.06.1.06.01.004.26.008 - Penyelenggaraan jaminan sosial bagi fakir miskin	Jumlah warga miskin yang memperoleh bantuan pangan (KK)	65000 KK	126,041 KK	65000 KK	56646 keluarga	87,15%	137.632 KK	137.632 KK	100,00%
				1.06.1.06.01.004.26.009 - Kegiatan Peningkatan Aksesibilitas Fakir Miskin dan PMKS Lainnya (DID)	Penanganan Covid-19 (Kegiatan)							4 kegiatan	
					Prosentase sarana dan prasarana Sistem Layanan Rujukan Terpadu di tingkat kelurahan (persen)	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%
				1.06.1.06.01.006.26 - Program Pelayanan Terpadu Kemiskinan	Persentase perangkat daerah terkait yang telah memanfaatkan BDT (%)	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%
					Jumlah Keluarga Miskin yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya								
				1.06.1.06.01.006.26.005 - Kegiatan Identifikasi dan verifikasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Data kesejahteraan sosial yang valid dan mutakhir (Dokumen)	2 Dokumen	14 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%

			1.06.1.06.01.006.26.006 - Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi (laporan)	12 Laporan	14 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	100,00%	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%
			1.06.1.06.01.006.26.007 - Kegiatan Pengendalian Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah laporan rekonsiliasi dan sinkronisasi data program penanggulangan kemiskinan (Dokumen)	12 Laporan	14 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	100,00%	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%
			1.06.1.06.01.006.26.010 - Revitalisasi dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data (DAK)	Prosentase penyediaan kelengkapan pengolahan data (%)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
			1.06.1.06.01.003.28 - Program Penanganan Fakir Miskin	Jumlah keluarga miskin yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya (keluarga)		871 Keluarga	451 Keluarga	440 Keluarga	97,56%	435 Keluarga	420 Keluarga	96,55%
			1.06.1.06.01.003.28.002 - Kegiatan pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin yang mengikuti pelatihan keterampilan (keluarga)	300 Keluarga	300 Keluarga	300 Keluarga	240 Keluarga	80,00%	0 Keluarga	0 Keluarga	0%
			1.06.1.06.01.003.28.006 - Pengembangan usaha ekonomi keluarga PMKS (DID)	Jumlah keluarga miskin yang mengikuti pengembangan usaha ekonomi (keluarga)	151 Keluarga	571 Keluarga	151 Keluarga	200 Keluarga	132,45%	470 Keluarga	420 Keluarga	89,36%
				Penanganan Covid-19 (Kegiatan)		4 kegiatan					9 kegiatan	
			1.06.1.06.01.001.29 - Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase pemenuhan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS (-)	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
			1.06.1.06.01.001.29.007 - Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di Puskesmas	Persentase klien rumah singgah yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%

	(persen)									
1.06.1.06.01.005.29 - Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase pemenuhan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS (-)	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%
1.06.1.06.01.005.29.001 - Kegiatan Rehabilitasi Sosial Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan	Cakupan korban trafficking yang memperoleh pelayanan advokasi dan perlindungan sosial (Orang)		48 Orang	48 Orang	48 Orang	100,00%	0	0	0,00%	
1.06.1.06.01.005.29.003 - Kegiatan Rehabilitasi Sosial Gelandang dan Pengemis	Jumlah gelandangan dan pengemis yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial (Orang)	122 Orang	122 Orang	120 Orang	120 Orang	100,00%	120 Orang	22 Orang	18,33%	
1.06.1.06.01.005.29.004 - Kegiatan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	Jumlah penjangkauan dan penertiban PMKS jalanan (kali)	320 Kali	320 Kali	160 Kali	160 Kali	100,00%	160 Kali	160 Kali	100,00%	
1.06.1.06.01.005.29.008 - Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Luar Panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial Dasar (Orang)	662 Orang	662 Orang	312 Orang	312 Orang	100,00%	350 Orang	350 Orang	100,00%	
1.06.1.06.01.005.29.009 - Kegiatan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah Lanjut Usia Luar panti yang memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial Dasar (Orang)	500 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang	100,00%	500 orang	0 Orang	0,00%	
1.06.1.06.01.005.29.011 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (DID)	Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh pembinaan melalui rehabilitasi sosial dan penyelenggaraan Hari Disabilitas Internasional (Orang)	3,175 Orang	3,175 Orang	1000 Orang	1210 Orang	121,00%	2085 Orang	1465 Orang	70,26%	

	Penanganan Covid-19 (Kegiatan)		4 Kegiatan					4 Kegiatan	
1.06.1.06.01.003.32 - Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (-)	2675 Orang	80%	80%	80%	100,00%	80%	80%	100,00%
1.06.1.06.01.003.32.001 - Kegiatan Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Jumlah lembaga yang mengikuti sosialisasi tentang CSR, Pengumpulan Uang Barang (lembaga)	0	120 Lembaga	0	0	0,00%	200 Lembaga	120 Lembaga	60,00%
1.06.1.06.01.003.32.002 - Kegiatan peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mengikuti bimbingan teknis (Orang)	2675 Orang	870 Orang	655 Orang	655 Orang	100,00%	150 Orang	215 Orang	143,33%
1.06.1.06.01.003.32.005 - Kegiatan Pelestarian Nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	Jumlah kegiatan-kegiatan dalam rangka pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial (Kegiatan)	2 Kegiatan	4 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00%	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00%
1.06.1.06.01.003.32.007 - Kegiatan Peningkatan jenjang kerja sama pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah Orang yang mengikuti Kegiatan Peningkatan jenjang kerja sama pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	0	120 Orang	0	0	0,00%	175 Orang	120 Orang	68,57%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Dalam menganalisis kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi tentunya organisasi tersebut memerlukan suatu ukuran yang dijadikan tolak ukur guna mengukur tingkat capaian kinerja. Dinas Sosial Kota Bandung sebagai penyelenggara pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial telah memiliki tolak ukur yang jelas yang digunakan dalam mengukur tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kota Bandung, adapun ukuran yang digunakan ialah Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Capaian kinerja Dinas Sosial Kota Bandung berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut :

- a. Sarana dan prasarana sosial seperti panti yang ada di Kota Bandung sampai dengan tahun 2020 sebanyak 89 Panti Sosial, yang terdiri atas 7 buah PSTW, 1 buah Rumah Singgah, 11 Buah Panti Rehabilitasi ,19 RPSA, dan 51 buah PSAA;
- b. Prosentase penanganan PMKS yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung sampai dengan pada tahun 2020 terdapat 70.383 orang PMKS yang ditangani, baik itu melalui program pelatihan keterampilan, pemberian bantuan usaha, rehabilitasi sosial, penjangkauan PMKS, pemberian bantuan di bidang pelayanan kesehatan seperti pemberian KIS dan jaminan kesehatan bagi warga miskin dan PMKS serta pelayanan pendidikan bagi anak sekolah yang termasuk dalam database kemiskinan Kota Bandung. Adapun populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bandung berdasarkan data perencanaan Tahun 2018 pada desil 1 dan desil 2 sebanyak 72.477 orang.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Kota Bandung

NO.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)	(7)	(7)	(13)
1	Prosentase penanganan warga miskin	√		21,59%	37,05%	52%	54,25%	78.16 %	100%	
2	Prosentase cakupan penanganan korban trafficking, korban bencana dan orang terlantar dalam perjalanan	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Prosentase penanganan anak terlantar dan anak jalanan	√		4,77%	8,74%	100,00%	20,33%	76,47%	100%	
4	Prosentase penanganan penyandang cacat	√		13,05%	19,73%	19,73%	22,11%	23,87%	28,78%	
5	Jumlah penghuni panti yang ditangani	√		3.554 orang	3.554 orang	511 Orang	3.842 Orang	1,886 Orang	511 Orang	
6	Prosentase gelandangan, pengemis, WTS, dan korban penyalahgunaan Napza yang ditangani		√	17,87%	50,89%	-	27,45%	100,00%	100%	
7	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang ikut serta dalam penanganan masalah sosial		√	1.800 PSKS	1800 PSKS	655 PSKS	2.073 PSKS	987 PSKS	455 PSKS	
8	Prosentase penanganan lanjut usia terlantar	√		27,28%	27,28%	-	89,18%	100,00%	100%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung pada Tahun 2020 sudah tergolong baik, termasuk dalam pencapaian target Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan LKPJ yang semakin membaik, dimana realisasi dari target tersebut telah mencapai melebihi target. Tingkat capaian kinerja yang membaik tersebut masih tergolong relatif kecil disebabkan oleh jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kota Bandung sangat besar jumlahnya sedangkan anggaran yang dilimpahkan kepada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung tidak sebanding dengan jumlah PMKS yang ada di Kota Bandung.

Ketercapaian dan ketidaktercapaian atas berbagai target kinerja penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Bandung yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Bandung dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi tersebut diantaranya :

- a. Belum diterapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Permensos RI Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Diharapkan apabila SPM Bidang Sosial telah diterapkan di Kota Bandung maka secara anggaran tentunya dapat meningkatkan penanganan permasalahan sosial di Kota Bandung.
- b. Posisi Kota Bandung sebagai ibukota provinsi sekaligus pusat perekonomian Provinsi Jawa Barat menyebabkan tingkat urbanisasi ke Kota Bandung yang cukup tinggi setiap tahunnya, sehingga secara tidak langsung hal tersebut dapat menyebabkan peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bandung, khususnya permasalahan PMKS Jalanan (Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan, dan Wanita Tuna Susila), karena kaum urban tersebut

sebagian besar tidak memiliki keterampilan dan kualifikasi yang cukup untuk masuk ke dunia kerja di Kota Bandung.

- c. Penanganan permasalahan sosial yang dilakukan oleh pihak swasta dalam hal yayasan atau perusahaan melalui program CSR (*Corporate Social Responsibilities*) masih bersifat parsial tidak terorganisir dengan baik, sehingga hasilnya pun kurang maksimal.
- d. Adanya pandemi Covid-19 yang mendorong adanya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Sosial Masyarakat) guna mengurangi penyebaran Virus Covid-19, berdampak pada berkurangnya target sasaran program kegiatan tahun 2020 di Kota Bandung.

Dengan adanya berbagai hambatan dan permasalahan di atas tentunya sangat berpengaruh pada tingkat capaian terhadap target Rencana Jangka Menengah Kota Bandung Tahun 2018-2023, dimana apabila Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung hanya mengandalkan sumber dana APBD Kota Bandung tentu hasilnya sangat jauh dari harapan. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Kementerian Sosial RI, Lembaga-lembaga Kesejahteraan Sosial yang ada di Kota Bandung, Organisasi Sosial, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, dan lain sebagainya.

Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung juga berkeyakinan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial pada masa yang akan datang akan lebih baik, hal tersebut didukung oleh faktor-faktor berikut :

- a. Komitmen Kepala Daerah dalam hal ini Walikota Bandung terhadap penanganan permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat sangat tinggi, hal ini dibuktikan dengan masuknya pelayanan sosial sebagai salah satu Misi dari Kota Bandung Tahun 2018-2023 dan penanganan PMKS merupakan salah satu prioritas daerah.
- b. Komitmen dan perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kota Bandung terhadap penanggulangan permasalahan sosial di Kota Bandung yang sangat tinggi, diharapkan mampu mendorong alokasi anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung.
- c. Dukungan dari para *stakeholders* (dunia usaha, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Organisasi Sosial, dll) terkait penanggulangan permasalahan sosial di masyarakat begitu tinggi, hanya belum terkoordinir dengan baik.
- d. Tren alokasi anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dari APBD Kota Bandung yang terus meningkat setiap tahunnya.
- e. Saat ini Dinas Sosial Kota Bandung mempunyai Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang diharapkan dengan adanya sarana tersebut dapat mempercepat penyelesaian permasalahan atau meningkatkan kualitas

pelayanan sosial di Kota Bandung dan Sistem Rujukan Layanan Terpadu sebagai sarana mempermudah warga miskin untuk mempermudah aksesibilitas Fakir Miskin.

Permasalahan sosial yang terjadi di Kota Bandung saat ini memang sangat memprihatinkan terutama permasalahan-permasalahan yang sifatnya kasat mata seperti permasalahan PMKS Jalanan.

Penanggulangan PMKS Jalanan ini perlu ditindaklanjuti secara komprehensif, dimana permasalahan tersebut timbul dikarenakan desakan kebutuhan ekonomi, permasalahan keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Hal ini menyebabkan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung perlu memformulasikan program dan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial yang dapat mengakomodir permasalahan tersebut.

24 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2021 bahwa Dinas Sosial Kota Bandung bertanggungjawab atas penyelenggaraan salah satu prioritas daerah yakni penanggulangan kemiskinan dan pengangguran terkait penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bandung, dimana pada RKPD tersebut telah ditentukan besaran anggaran Pagu Indikatif untuk Belanja Langsung Urusan Wajib pada Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2021. Adapun pagu indikatif untuk Belanja Langsung Urusan Wajib sebesar Rp. **44.009.135.557,-** (*Empat Puluh Empat Milyar Sembilan Juta eratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*), peruntukan Belanja Langsung tersebut ialah untuk membiayai program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Urusan Wajib : Sosial). Apabila melihat usulan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung terkait anggaran yang dibutuhkan guna pencapaian target RPJMD sementara Kota Bandung Tahun 2021 dan usulan Musrenbang Kota Bandung maka anggaran tersebut cukup memadai, sehingga diharapkan beberapa target kinerja Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dapat tercapai sesuai RPJMD sementara Kota Bandung Tahun 2021. Proses review ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan kebutuhan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung terkait pencapaian target kinerja dan tupoksi Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung pada Tahun 2021. Mengenai perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan
Awal RKPD Tahun 2021 Dinas
Sosial Kota Bandung

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp.	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bandung	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	27.789.529.276	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bandung	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	27.789.529.276	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bandung	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	10.105.102.002	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bandung	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	10.105.102.002	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bandung	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	95.716.500	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bandung	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	95.716.500	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bandung	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	938.660.390	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bandung	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	938.660.390	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandung	Pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	4.098.942.430	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandung	Pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	4.098.942.430	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bandung	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	100%	7.528.582.340	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bandung	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	100%	7.528.582.340	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bandung	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	100%	5.022.525.614	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bandung	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	100%	5.022.525.614	
2	Program Pemberdayaan Sosial	Kota Bandung	Prosentase PSKS yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan	90%	1.708.050.000	Program Pemberdayaan Sosial	Kota Bandung	Prosentase PSKS yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan	90%	1.708.050.000	

			kesejahteraan sosial					kesejahteraan sosial			
	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bandung	Jumlah laporan pengumpulan sumbangan uang dan barang	4 Dokumen	89.140.000	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bandung	Jumlah laporan pengumpulan sumbangan uang dan barang	4 Dokumen	89.140.000	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bandung	Jumlah kegiatan pengembangan PSKS	5 Kegiatan	1.618.910.000	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bandung	Jumlah kegiatan pengembangan PSKS	5 Kegiatan	1.618.910.000	
3	Program Rehabilitasi Sosial	Kota Bandung	Prosentase capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial	100%	9.395.729.150	Program Rehabilitasi Sosial	Kota Bandung	Prosentase capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial	100%	9.395.729.150	
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Bandung	Prosentase penyandang disabilitas, anak, dan lansia terlantar yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dasar	100%	3.115.332.800	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Bandung	Prosentase penyandang disabilitas, anak, dan lansia terlantar yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dasar	100%	3.115.332.800	
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Bandung	Prosentase penyandang disabilitas, anak, dan lansia terlantar yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dasar	100%	2.105.975.000	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Bandung	Prosentase penyandang disabilitas, anak, dan lansia terlantar yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dasar	100%	2.105.975.000	
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Bandung	Prosentase penyandang disabilitas, anak, dan lansia terlantar yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dasar	100%	4.174.421.350	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Bandung	Prosentase penyandang disabilitas, anak, dan lansia terlantar yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dasar	100%	4.174.421.350	
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kota Bandung	Cakupan anak terlantar dan fakir miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	70%	2.685.387.600	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kota Bandung	Cakupan anak terlantar dan fakir miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	70%	2.685.387.600	

	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bandung	Jumlah dokumen pelaporan pemantauan pemeliharaan anak terlantar	12 Dokumen	34.680.000	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bandung	Jumlah dokumen pelaporan pemantauan pemeliharaan anak terlantar	12 Dokumen	34.680.000	
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bandung	Jumlah keluarga miskin yang memperoleh pengembangan ekonomi dan bantuan stimulan usaha ekonomi	300 KK	1.279.245.000	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bandung	Jumlah keluarga miskin yang memperoleh pengembangan ekonomi dan bantuan stimulan usaha ekonomi	300 KK	1.279.245.000	
		Kota Bandung	Cakupan data fakir miskin yang valid dan mutakhir	100%	1.371.462.600		Kota Bandung	Cakupan data fakir miskin yang valid dan mutakhir	100%	1.371.462.600	
5	Program Penanganan Bencana	Kota Bandung	Cakupan korban bencana yang terlayani tepat waktu	100%	2.238.069.000	Program Penanganan Bencana	Kota Bandung	Cakupan korban bencana yang terlayani tepat waktu	100%	2.238.069.000	
	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kota Bandung	Cakupan korban bencana yang memperoleh bantuan tanggap darurat	100%	1.597.695.000	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kota Bandung	Cakupan korban bencana yang memperoleh bantuan tanggap darurat	100%	1.597.695.000	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Bandung	Jumlah kegiatan pemberdayaan kesiapsiagaan bencana	4 Kegiatan	640.374.000	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Bandung	Jumlah kegiatan pemberdayaan kesiapsiagaan bencana	4 Kegiatan	640.374.000	
6	Program Pengelolaan taman Makam Pahlawan	Kota Bandung	Cakupan Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	100%	192.370.531	Program Pengelolaan taman Makam Pahlawan	Kota Bandung	Cakupan Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	100%	192.370.531	
	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Bandung	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	2 unit	192.370.531	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Bandung	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	2 unit	192.370.531	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Di era reformasi birokrasi saat ini, proses perencanaan tidak hanya dilakukan secara *top down* akan tetapi juga secara *bottom up* artinya pihak pemerintah juga harus dapat mengakomodir usulan dari masyarakat terkait rencana pembangunan daerah melalui proses Musrenbang. Sehingga dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung pada Tahun 2021 tentunya Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung juga perlu mengakomodir berbagai usulan dari para *stakeholders* seperti masyarakat selain program dan kegiatan yang telah dirumuskan oleh Dinas Sosial Kota Bandung terkait rencana pencapaian target RPJMD Kota Bandung dan Renstra Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2019-2023. Adapun proporsi usulan masyarakat yang harus diakomodir oleh Dinas Sosial Kota Bandung sebagaimana diatur oleh Peraturan Daerah Kota Bandung yakni sebesar 30% dari keseluruhan Program dan Kegiatan pada SKPD.

Usulan dari masyarakat ini diperoleh melalui proses pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrebang) Tingkat Kecamatan yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandung selama bulan Februari dan Maret 2020. Dalam mengakomodir berbagai usulan dari masyarakat terkait pelayanan kesejahteraan sosial tentunya Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung perlu memperhatikan kesesuaiannya dengan tugas dan fungsi serta kemampuan secara anggaran dari Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, hal ini menyebabkan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung mungkin tidak dapat mengakomodir seluruh usulan rencana pembangunan kesejahteraan sosial dari masyarakat untuk Tahun 2021. Daftar usulan warga masyarakat yang diakomodir dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Usulan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun Anggaran 2020

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	Program Rehabilitasi Sosial	Kota Bandung	Persentase pemenuhan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS	277	-
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Bandung	Prosentase disabilitas yang memperoleh alat bantugerak	100	Crutches Billateral
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Bandung	Prosentase disabilitas yang memperoleh alat bantugerak	162	Walker
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Bandung	Prosentase disabilitas yang memperoleh alat bantugerak	15	Tongkat putih

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut :

- a. Kemiskinan, yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
- b. Ketelantaran, yaitu pengabaian / penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab atau kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis, dan sosial secara wajar yang disebabkan oleh ketidakmampuan sosial ekonomi, dan pengabaian terhadap tugas dan tanggungjawab;
- c. Kecacatan, yaitu hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi psikologi maupun fisiologis;

- d. Keterpencilan, yaitu isolasi alam yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh komunitas adat terpencil atau kondisi kehidupan komunitas sosial budaya lokal yang tinggal pada lokasi yang terisolir secara geografis dan sulit terjangkau serta belum ada kontak (interaksi) dengan dunia luar;
- e. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, yaitu merupakan indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi dan pendidikan seseorang atau kondisi penyimpangan atau pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial, moral, dan etika yang berlaku di masyarakat;
- f. Korban bencana, yaitu perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya; dan/atau
- g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, yaitu orang (baik individu, keluarga atau kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik dalam bentuk penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat meliputi:

- a. Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- b. Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- c. Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- d. Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung

Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan bidang kesejahteraan sosial dalam bentuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum dalam Program Prioritas Daerah Kota Bandung bertanggungjawab secara penuh terkait penyelenggaraan kesejahteraan

sosial di Kota Bandung. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial, dimana berdasarkan Perda Nomor 24 Tahun 2012 bahwa tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung ialah :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat;
2. Memulihkan fungsi sosial masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian masyarakat;
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kemampuan, keterampilan, kemandirian, dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Mengacu pada rumusan tersebut maka tujuan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang kesejahteraan sosial ialah meningkatkan kualitas hidup para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kota Bandung.

Berdasarkan tujuan pelayanan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, maka sasaran yang ingin dicapai antara lain :

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- b. Meningkatkan upaya-upaya rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- d. Meningkatkan kapasitas kinerja pegawai serta sistem administrasi pelaporan kinerja dan keuangan Berdasarkan tujuan di atas, dijabarkan ke dalam beberapa sasaran yang ingin dicapai yaitu :

Tabel 3.2
Sasaran dan Indikator Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
Tahun 2021

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan	Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS	Prosentase PMKS yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasar	80
2	hidup PMKS dan warga tidak mampu	Meningkatkan kualitas pelayanan bagi warga miskin	Prosentase warga tidak mampu yang meningkat kualitas hidupnya	52%

Berbagai sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung sebagaimana tersebut di atas, melalui Rencana Kerja Tahun 2021 ini dijabarkan ke dalam berbagai program dan kegiatan yang diharapkan mampu menunjang terhadap ketercapaian berbagai sasaran dari penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Bandung pada Tahun 2021.

2.1 Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung pada Tahun 2021 tetap merujuk pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 004 Tahun 2011 tentang Perubahan ke Lima atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah tentunya Dinas Sosial Kota Bandung perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang sekiranya dapat mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan, adapun faktor-faktor tersebut antara lain target RPJMD sementara Kota Bandung Tahun 2021, pagu indikatif, lokasi kegiatan, serta SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan.

Guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2021 ini, maka disusun beberapa program dan kegiatan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Adapun program, kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2021 sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 yaitu sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- (1). Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- (2). Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- (3). Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- (4). Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- (5). Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- (6). Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- (7). Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
- (8). Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- (9). Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- (10). Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- (11). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- (12). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- (13). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- (14). Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- (15). Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Pemberdayaan Sosial**1. Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**

- (16). Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

2. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

- (17). Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
- (18). Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

III. Program Rehabilitasi Sosial**3. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**

- (19). Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu
- (20). Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
- (21). Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
- (22). Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan

4. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

- (23). Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- (24). Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
- (25). Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan

5. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

- (26). Sub Kegiatan Penyediaan Makanan
- (27). Sub Kegiatan Penyediaan Sandang

IV. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**6. Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anaka Terlantar**

- (28). Sub Kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar

7. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- (29). Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

8. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- (30). Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- (31). Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

V. Program Penanganan Bencana**9. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**

- (32). Sub Kegiatan Penyediaan Makanan
- (33). Sub Kegiatan Penyediaan Sandang

10. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

- (34). Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
- (35). Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

VI. Program Pengelolaan taman Makam Pahlawan

- 11. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**
- (36). Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- (37). Sub Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Mengenai rincian atas target, pagu indikatif, dan lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2021
dan Prakiraan Maju Tahun 2022**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2022	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					Urusan Wajib Pelayanan Dasar		Kota Bandung		44.009.135.557	APBD			48.410.049.113
1	06				Urusan Pemerintah Bidang Urusan Sosial		Kota Bandung		44.009.135.557	APBD			48.410.049.113
1	06	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Kota Bandung	100%	27.789.529.276	APBD		100%	30.568.482.204
1	06	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Kota Bandung	100%	10.105.102.002	APBD		100%	11.115.612.202
1	06	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Pelaporan penyediaan Gaji dan Tunjangan	Kota Bandung	12 Dokumen	10.105.102.002	APBD		12 Dokumen	11.115.612.202
1	06	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Kota Bandung	100%	95.716.500	APBD		100%	105.288.150
1	06	01	2.05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas	Kota Bandung	45 Stel	34.375.000	APBD		45 Stel	37.812.500
1	06	01	2.05	11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Kota Bandung	45 Orang	61.341.500	APBD		45 Orang	67.475.650

1	06	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Kota Bandung	100%	938.660.390	APBD		100%	1.032.526.429
1	06	01	2.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dokumen pelaporan penyediaan alat tulis kantor	Kota Bandung	12 Dokumen	277.343.890	APBD		12 Dokumen	305.078.279
1	06	01	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen pelaporan penyediaan barangcetakan dan penggandaan	Kota Bandung	12 Dokumen	182.936.500	APBD		12 Dokumen	201.230.150
1	06	01	2.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan (Koran dan majalah) yangdisediakan dalam setahun	Kota Bandung	12 Dokumen	13.200.000	APBD		12 Dokumen	14.520.000
1	06	01	2.06	08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah dokumen pelaporan penyediaan makanandan minuman	Kota Bandung	12 Dokumen	30.030.000	APBD		12 Dokumen	33.033.000
1	06	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaporan penyelenggaran rapat koordinasidan konsultasi ke luar daerah	Kota Bandung	12 Dokumen	435.150.000	APBD		12 Dokumen	478.665.000
1	06	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Kota Bandung	100%	4.098.942.430	APBD		100%	4.508.836.673
1	06	01	2.07	02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas evakuasi yang tersedia	Kota Bandung	1 unit	273.293.570	APBD		1 unit	300.622.927
1	06	01	2.07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dokumen pelaporan penyediaanpelengkapan kantor	Kota Bandung	12 Dokumen	3.825.648.860	APBD		12 Dokumen	4.208.213.746
1	06	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	Kota Bandung	100%	7.528.582.340	APBD		100%	8.281.440.574
1	06	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah dokumen pelaporan penyediaan jasakomunikasi, air dan listrik	Kota Bandung	12 Dokumen	1.015.863.600	APBD		12 Dokumen	1.117.449.960

1	06	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah personil jasa kebersihan, keamanan, administrasi dan supir kantor yang tersedia	Kota Bandung	105 Orang	6.512.718.740	APBD		105 Orang	7.163.990.614
1	06	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	Kota Bandung	100%	5.022.525.614	APBD		100%	5.524.778.175
1	06	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dokumen pelaporan pemeliharaan kendaraan dinas	Kota Bandung	12 Dokumen	1.083.468.620	APBD		12 Dokumen	1.191.815.482
1	06	01	2.09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dokumen pelaporan pemeliharaan peralatankantor	Kota Bandung	12 Dokumen	104.005.000	APBD		12 Dokumen	114.405.500
1	06	01	2.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dilakukan perbaikan/renovasi	Kota Bandung	2 Gedung	3.835.051.994	APBD		2 Gedung	4.218.557.193
1	06	02			Program Pemberdayaan Sosial	Prosentase PSKS yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Kota Bandung	90%	1.708.050.000	APBD		90%	1.878.855.000
1	06	02	2.02		Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengumpulan sumbangan uang dan barang	Kota Bandung	4 Dokumen	89.140.000	APBD		4 Dokumen	98.054.000
1	06	02	2.02	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi UGB dan PUB	Kota Bandung	4 Dokumen	89.140.000	APBD		4 Dokumen	98.054.000
1	06	02	2.03		Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengembangan PSKS	Kota Bandung	5 Kegiatan	1.618.910.000	APBD		5 Kegiatan	1.780.801.000

1	06	02	2.03	02	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah bimtek yang diselenggarakan bagi PSM dan TKSK	Kota Bandung	2 Kegiatan	593.753.000	APBD		2 Kegiatan	653.128.300
1	06	02	2.03	04	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilakukan	Kota Bandung	4 Kegiatan	1.025.157.000	APBD		4 Kegiatan	1.127.672.700
1	06	04			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial	Kota Bandung	100%	9.395.729.150	APBD		100%	10.335.302.065
1	06	04	2.01		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas, anak, dan lansia terlantar yang memperoleh layananrehabilitasi sosial dasar	Kota Bandung	100%	3.115.332.800	APBD		100%	3.426.866.080
1	06	04	2.01	03	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Persentase disabilitas yang memperoleh alat bantugerak	Kota Bandung	100%	140.882.500	APBD		100%	154.970.750
1	06	04	2.01	05	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Prosentase PMKS terlantar yang memperolehbimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Kota Bandung	100%	2.297.369.550	APBD		100%	2.527.106.505
1	06	04	2.01	06	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Keluarga PMKS Terlantar yang memperolehbimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Kota Bandung	40 Orang	191.080.750	APBD		40 Orang	210.188.825
1	06	04	2.01	10	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Persentase PMKS terlantar yang memperoleh layanankedaruratan	Kota Bandung	100%	486.000.000	APBD		100%	534.600.000

1	06	04	2.01		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Prosentase penyandang disabilitas, anak, dan lansia terlantar yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dasar	Kota Bandung	100%	2.105.975.000	APBD		100%	2.316.572.500
1	06	04	2.01	08	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase peserta PKH yang mampu mengakses layanan pendidikan dan kesehatan	Kota Bandung	100%	1.680.000.000	APBD		100%	1.848.000.000
1	06	04	2.01	09	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Kota Bandung	100%	216.975.000	APBD		100%	238.672.500
1	06	04	2.01	12	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Prosentase klien rumah singgah dan PMKS lainnya yang memperoleh layanan rujukan	Kota Bandung	100%	209.000.000	APBD		100%	229.900.000
1	06	04	2.01		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Prosentase penyandang disabilitas, anak, dan lansia terlantar yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dasar	Kota Bandung	100%	4.174.421.350	APBD		100%	4.591.863.485
1	06	04	2.01	01	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Prosentase penyandang disabilitas, anak, dan lansia terlantar yang memperoleh layanan permakanan	Kota Bandung	100%	3.427.347.000	APBD		100%	3.770.081.700
1	06	04	2.01	02	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Prosentase penyandang disabilitas, anak, dan lansia terlantar yang memperoleh layanan bantuan sandang	Kota Bandung	100%	747.074.350	APBD		100%	821.781.785
1	06	05			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan anak terlantar dan fakir miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Kota Bandung	70%	2.685.387.600	APBD		70%	2.953.926.360

1	06	05	2.01		Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anaka Terlantar	Jumlah dokumen pelaporan pemantauan pemeliharaan anak terlantar	Kota Bandung	12 Dokumen	34.680.000	APBD		12 Dokumen	38.148.000
1	06	05	2.01	03	Sub Kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Dokumen Pelaporan Pemantauan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kota Bandung	12 Dokumen	34.680.000	APBD		12 Dokumen	38.148.000
1	06	05	2.02		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga miskin yang memperoleh pengembangan ekonomi dan bantuan stimulan usaha ekonomi	Kota Bandung	300 KK	1.279.245.000	APBD		300 KK	1.407.169.500
1	06	05	2.02	04	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah keluarga miskin yang memperoleh pengembangan ekonomi dan bantuan stimulan usaha ekonomi	Kota Bandung	300 Orang	1.279.245.000	APBD		300 Orang	1.407.169.500
1	06	05	2.02		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan data fakir miskin yang valid dan mutakhir	Kota Bandung	100%	1.371.462.600	APBD		100%	1.508.608.860
1	06	05	2.02	01	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pemutakhiran data fakir miskin	Kota Bandung	4 Dokumen	1.299.045.600	APBD		4 Dokumen	1.428.950.160
1	06	05	2.02	02	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	presentase SKPD yang seharusnya memanfaatkan data terpadu kemiskinan atau DTKS	Kota Bandung	100%	72.417.000	APBD		100%	79.658.700
1	06	06			Program Penanganan Bencana	Cakupan korban bencana yang terlayani tepat waktu	Kota Bandung	100%	2.238.069.000	APBD		100%	2.461.875.900
1	06	06	2.01		Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Cakupan korban bencana yang memperoleh bantuan tanggap darurat	Kota Bandung	100%	1.597.695.000	APBD		100%	1.757.464.500
1	06	06	2.01	01	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Cakupan penyediaan bantuan pangan bagi korban bencana	Kota Bandung	100%	1.419.330.000	APBD		100%	1.561.263.000

1	06	06	2.01	02	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Cakupan penyediaan bantuan logistik sandang bencana	Kota Bandung	100%	178.365.000	APBD		100%	196.201.500
1	06	06	2.02		Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemberdayaan kesiapsiagaan bencana	Kota Bandung	2 Kegiatan	640.374.000	APBD		2 Kegiatan	704.411.400
1	06	06	2.02	01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan kampungsiaga bencana	Kota Bandung	2 Kegiatan	80.916.000	APBD		2 Kegiatan	89.007.600
1	06	06	2.02	02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah personil Tagana yang Sosial Korban mengikuti pelatihan tanggap bencana	Kota Bandung	60 Orang	559.458.000	APBD		60 Orang	615.403.800
1	06	07			Program Pengelolaan taman Makam Pahlawan	Cakupan Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	Kota Bandung	100%	192.370.531	APBD		100%	211.607.584
1	06	07	2.01		Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	Kota Bandung	1 unit	192.370.531	APBD		1 unit	211.607.584
1	06	07	2.01	01	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang dilakukan rehabilitasi sarana dan prasarana	Kota Bandung	1 Unit	108.675.931	APBD		1 Unit	119.543.524
1	06	07	2.01	03	Sub Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang dilakukan pengamanan	Kota Bandung	2 Unit	83.694.600	APBD		2 Unit	92.064.060

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2021 merupakan sebuah produk rencana kerjasama dari seluruh komponen organisasi melalui pembahasan-pembahasan yang melibatkan lintas sektoral dan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Rencana Kerja yang telah tersusun ini tidak dapat semata-mata dijadikan sebuah komitmen, tetapi sangat penting sebagai pedoman dan acuan kerja bagi seluruh unsur Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Dinas.

Kondisi objektif organisasi mengisyaratkan betapa pentingnya implementasi sebuah komitmen, oleh karenanya Rencana Kerja yang tersusun ini harus dapat dijadikan fungsi sebagai berikut :

1. Secara konsisten dijadikan pedoman dan acuan dasar serta diimplementasikan ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal;
2. Sebagai pengikat yang sinergis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
3. Merupakan landasan bagi Rencana Kerja tahap berikutnya.

Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dalam mengaktualisasikan Renja ini sangat diharapkan, yang pada gilirannya akan mampu mendorong perwujudan Visi, Misi, dan Tupoksi Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.

Bandung, Januari 2021

**KEPALA DINAS SOSIAL DAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KOTA BANDUNG**



DR. TONG RUSDIANTONO H., M.Si.

NIP. 19651118 198603 1 005